IMPLEMENTASI PROGRAM AKADEMI KELUARGA JABAR JUARA DALAM MENEGAH *CHILDREN STUNTING* DI KABUPATEN SUMEDANG

Rika Kusdinar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

*Corresponding Email: rika_kusdinar@unsap.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) program in children stunting in the Sumedang District Population Control and Family Planning Agency, the obstacles to its implementation, and efforts to overcome these obstacles. The method used in the preparation of this research report is a qualitative research method with a descriptive type. The sampling technique used was purposive sampling, with research informants: Head of Family Welfare Division, Staff of Family Welfare Division, and Head of Adolescent Reproductive Health Section (Family Planning). Data collection techniques through library research and field studies. In analyzing the data, the Miles and Huberman model used the following steps: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification, and triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) program in children stunting at the Population Control and Family Planning Office of Sumedang Regency had been carried out in accordance with the provisions set out with a structured implementation flow through the formation of a family companion team made by DPPKB. However, in its implementation, currently experiencing several obstacles, including the lack of human resources in the program and some of the contents of the policy are not yet known by several target groups. In addition, another obstacle is that there are budget resources that are not yet available in every village where they still utilize the APBDes budget while the budget is limited. In overcoming these obstacles, several efforts were made, including holding clarifications or coordination meetings for policy clarity accompanied by training and information for both employees and target groups. And utilize the budget that will be used according to needs. Suggestions in connection with this research is to allocate people who focus on implementing the Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) program in every village/kelurahan so that in terms of accountability and equity it is clear so that the objectives of this program can be achieved.

KeyWord: Public Policy, Implementation, Stunting

PENDAHULUAN

Mewujudkan generasi emas 2045 merupakan impian Indonesia. Diharapkan pada usianya yang ke-100 tahun Indonesia dapat memanfaatkan peluang demokrasi dengan tersedianya sumber daya manusia berkualitas, yakni sumber daya yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing. Dapat dikatakan kunci utama dalam mewujudkan mimpi tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Salah satu tantangan pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas adalah *children stunting*.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan berkembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. *Stunting* merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di Negara berkembang, termasuk Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 27,67% dari 37,8% pada tahun 2013. Namun, angka ini lebih tinggi dari toleransi maksimal *stunting* yang ditetapkan oleh WHO. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka *stunting* di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Dampak jangka pendek *stunting* adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta beresiko tinggi munculnya penyakit metabolik. *Stunting* menjadi salah satu ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI)

Kabupaten Sumedang merupakan satu dari 17 kabupaten di Jawa Barat dengan kasus *stunting* yang tinggi. Untuk itu pencegahan *stunting* memerlukan strategi dan metode baru yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu pembaruan strategi pencegahan *stunting* dengan melalui program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) yang dibentuk oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2018.

Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) adalah program edukasi keluarga yang diikuti oleh remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak dibawah dua tahun untuk pencegahan *stunting*. Guna melaksanakan amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang mengimplementasikan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam upaya mencegah *stunting*.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Pasal (2) memiliki tupoksi yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DPPKB Kabupaten Sumedang sebagai pelaksana pembinaan, pengendalian, dan pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB) serta melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait. Oleh karena itu, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang telah melaksanakan salah satu kebijakan dari pemerintah yaitu program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ).

Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Sederhananya implementasi melibatkan berbagai pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan proses dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan dilakukan oleh aparat dan pejabat pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan tercapai sesuai dengan rencana.

Disamping itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan beragam kepentingan yang melekat pada pihak yang terkait. Kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan.

Maka implementasi program merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar diaplikasikan di lapangan dan berhasil menghasilkan keluaran seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk mewujudkan masukan dan keluaran yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan.

Program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) telah dilaksanakan di beberapa desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Terkait dengan pengimplementasian program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) maka perlu adanya koordinasi dari berbagai pihak yang terkait, agar dalam pelaksanaannya dalam menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) ini diharapkan dapat mencegah terjadinya *children stunting* dan percepatan penurunan *stunting* menjadi 0% di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 mendatang.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, tidak terlepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) yang diimplementasikan di Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), hal tersebut dapat diketahui melalui indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Derajat perubahan yang ingin dicapai belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) belum lama berjalan.
2. Letak pengambilan keputusan belum maksimal. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dukungan operasional terutama dalam anggaran yang masih belum optimal.
3. Masih kurangnya sumber daya dalam melaksanakan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ). Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber daya yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah *children stunting* di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016).

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam Mencegah *Children Stunting* di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang. Informan adalah wakil dari sasaran yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil informan adalah menggunakan *purposive sampling* menurut Sugiyono (2016) teknik *purposive sampling* adalah “Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang di Bidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.

Tabel 1. Informan Penelitian

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	1
2.	Staff Keluarga Sejahtera	1
3.	Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja	1
Jumlah		3

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyusunan mengambil sejumlah orang tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dan bertanggungjawab dalam Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan pengolahan data menggunakan Model Miles dan Huberman yang terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penerarikan Kesimpulan/Verifikasi), dan Triangulasi (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2014).

Selain itu, Horn dan Meter (Mulyadi, 2018) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dengan demikian, dilihat dari beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang diperlukan adalah menentukan model implementasi yang akan digunakan. Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (Agustino, 2016) mengatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: 1). Karakteristik dari masalah (*Tractability of the problem*); 2). Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*Ability to structure implementation*); 3). Variabel lingkungan (*Nonstatutory variable affecting implementation*).

Selain itu, unsur-unsur implementasi kebijakan yang perlu diperhatikan adalah

1. Unsur pelaksana. Implementor kebijakan merupakan pihak- pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
2. Adanya program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.
3. Target grup atau kelompok sasaran. Target grup atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. (Dimock dan Dimock dalam Tachjan, 2006).

Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan untuk mengukur implementasi program akademi keluarga jabar juara dalam mencegah children stunting di Kabupaten Sumedang merujuk pada dua dimensi implementasi menurut Gridle dalam Agustino (2006) yaitu: 1) Isi kebijakan (*Content of policy*), dan 2) Konteks kebijakan (*Context of policy*).

Hasil wawancara untuk masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Hasil Wawancara Implementasi Program Akademi Jabar Juara Dalam Mencegah Children Stunting di Kabupaten Sumedang

Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara
Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>)	Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi	Dalam implementasi program AKJJ ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari Dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu sendiri dan PKK dalam pencegahan <i>children stunting</i> . Implementasi program AKJJ harus multisektor sehingga melibatkan beberapa pihak terkait baik dari internalnya maupun dari eksternalnya, dari atas hingga bawah semua yang terlibat dalam program ini saling memiliki keterkaitan terhadap pencegahan <i>children stunting</i> .
	Tipe manfaat	Program AKJJ ini sangat bermanfaat bagi Dinas. Dengan adanya program ini tentu saja sangat menjadi pendongkrak untuk mencegah <i>children stunting</i> . Dengan AKJJ maka akan tersusun program-program yang lokusnya terhadap penurunan stunting. Dengan demikian, diharapkan tujuan dalam penurunan <i>stunting</i> bisa lebih cepat tercapai. Manfaat dari program ini yaitu masyarakat menjadi lebih paham tentang pencegahan <i>stunting</i> dengan meningkatkan kesehatan dan gizi dari ibu hamil dan pola pengasuhannya sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif dan dapat bersaing di masa yang akan datang.

Derajat perubahan yang ingin dicapai	<p>Perubahan yang diharapkan dari program AKJJ ini adalah masyarakat mampu memahami pola asuh yang baik agar di tahun 2023 tidak ada kasus <i>stunting</i> baru dan mengubah angka <i>stunting</i> dari 14% menjadi 0% di Kabupaten Sumedang.</p> <p>Tingkat keberhasilan perubahan yang dirasakan belum terlalu signifikan karena AKJJ ini merupakan program baru jadi belum menyeluruh di setiap desa dan belum terlihat hasil yang diinginkannya. Namun langkah saat ini telah ke tahap pembentukan tim yang akan memberikan pembekalan kepada setiap masyarakat untuk penurunan <i>stunting</i> itu.</p>
Letak pengambilan keputusan	<p>Ketepatan pencapaian dari program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> dilihat dari pencapaian indikator yang fokus terhadap remaja, Ibu hamil, dan ibu baduta. Hal ini untuk memberikan pengetahuan mulai dari persiapan hamil hingga anak usia dua tahun. Tentang pemenuhan gizi hingga pola asuh orang tua.</p> <p>Keputusan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang mengenai permasalahan belum meratanya program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) di setiap desa/kelurahan di Kabupaten Sumedang yang pertama adalah fokus terhadap persiapan sumber daya manusia(SDM), melaksanakan sosialisasi terhadap penanggung jawab tentang APBD dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Yang terakhir adalah mengeluarkan surat edaran dari Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaannya program AKJJ.</p>
Pelaksana program	<p>Pelaksanaan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang adalah dengan jemput bola. Maksudnya adalah dengan mendatangi dan mencari lokus. Lalu berkoordinasi dengan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan APBD, kemudian Kabupaten, dan dinas Kesehatan. Namun pelaksanaan terhadap masyarakat itu sendiri adalah dengan memberikan pelatihan terhadap remaja, ibu hamil, dan ibu baduta dengan cara mempelajari 1000 HPK(1000 Hari Pertama Kelahiran).</p> <p>Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang adalah Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah).</p>
Sumber daya yang digunakan	<p>Kontribusi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) adalah dengan memahami tentang program AKJJ ini bahwa <i>stunting</i> adalah permasalahan nasional. Dan DPPKB bergerak langsung ke lapangan dalam</p>

		melaksanakan program ini. Yang menjadi sasaran dalam mengimplementasikan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> adalah remaja, ibu hamil, dan Ibu Baduta.
Konteks Kebijakan (<i>Context of Policy</i>)	Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat	Sosialisasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang mengenai program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> adalah dengan menyiapkan SDM yang tepat, lalu membuat tim untuk melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tiap UPT (Unit Pelaksana Teknis). Kekuasaan yang dimiliki pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang berpengaruh terhadap pengimplementasian program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) hal ini dikarenakan memiliki andil yang besar yaitu kuasa untuk menggerakkan program langsung dilapangan.
	Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa	Layanan penyediaan sarana penyampaian keluhan masyarakat mengenai pengimplementasian program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) saat ini belum ada. Namun UPT di setiap kecamatan sudah terstruktur dengan baik. Karakteristik dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas sebagai koordinasi dan melakukan kolaborasi di lapangan dalam prosesnya ciri khas yang dimiliki yaitu belajar mengajar yang tidak seperti di sekolah biasa dengan adanya perjanjian di awal yang harus disetujui oleh keluarga dan juga dalam pemberian materi lebih fokus pada hal yang berkaitan dengan pencegahan <i>stunting</i> .
	Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok pelaksana	Tingkat kepatuhan dan respon pegawai sudah dalam kategori baik namun masih belum adanya daftar ceklis untuk melengkapi pengukuran kepatuhan pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengimplementasikan program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ). Tingkat kepatuhan dan respon kelompok sasaran (ibu yang mempunyai balita, ibu hamil dan menyusui, remaja) dalam mengikuti program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah <i>children stunting</i> sangat patuh. Hal ini bisa dilihat dari bisa terlaksananya 16 modul dan DPPKB mengadakan kelas sesuai dengan letak geografis sasaran yang dimana ini tidak sama sekali memberatkan para sasaran.

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam Implementasi program Akademi Jabar Juara (AKJJ) memiliki kepentingan yang saling mempengaruhi dari pihak lain seperti Dinas Kesehatan PKK dan DPPKB itu sendiri. Program ini sangat bermanfaat baik bagi Dinas maupun bagi masyarakat sebagai pendongkrak pencegahan *children stunting*. Dengan adanya program ini diharapkan pada tahun 2023 angka *stunting* dari 14% menjadi 0% tetapi perubahan yang dirasakan belum terlalu signifikan. Sasaran dari program ini yaitu remaja, ibu hamil dan ibu baduta, dalam pelaksanaan programnya mereka diberi pelatihan dengan mempelajari kelas 1000 HPK. Dengan kata lain, program akademi jabar juara yang diimplementasikan di Kabupaten Sumedang memiliki manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Grindle (Agustino, 2006) yang menyatakan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Kedua, strategi yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya program yaitu dengan membuat tim pendamping keluarga karena mempunyai andil yang besar untuk menggerakkan program ini. DPPKB sebagai koordinasi dan melakukan kolaborasi di lapangan yang membuat tingkat kepatuhan pegawai dan kelompok sasaran baik. Hal ini dilihat dari terlaksananya pembelajaran 16 modul di kelas 1000 HPK.

SIMPULAN

Pelaksanaan implementasi program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) dalam mencegah *children stunting* di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan alur pelaksanaan yang terstruktur melalui pembentukan tim pendamping keluarga yang di buat oleh DPPKB. Pembaruan strategi pencegahan *children stunting* dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai edukasi kelas 1000 HPK. Namun dalam implementasi program Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) masih belum terlihat perubahan yang signifikan disebabkan oleh program yang belum lama berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Aneka Cipta.
- Bambang, Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT Karya Unipress.
- BKKBN. 2021. *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta.
- Budi, Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3.
- Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey.
- Miftah Thoha. 2011. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Rika Kusdinar, Dwi Riko Ramadhan Nur, Intan Siti Hapsah, Silva Nurzamani Abdillah, Triyanti Agustiani, Yogi Muhamad Ridwan

Implementasi Program Akademi Keluarga Jabar Juara Dalam Mencegah *Children Stunting* Di Kabupaten Sumedang

Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.